

ABSTRAK

Muhammad Thoriq Alnuddin (1010611067), Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Yang Dilindungi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya. Dibawah bimbingan Dr. M. Ali Zaidan SH, MH.

Manusia, hewan, dan tumbuhan dalam mempertahankan hidupnya memerlukan komponen lain yang terdapat di lingkungannya. Tumbuhan dan hewan di perlukan manusia sebagai sumber makanan, tumbuhan juga menjadi makanan hewan, bahkan ada juga hewan yang menjadi makanan hewan lainnya. Oksigen yang kita hirup dari udara dalam pernafasan kita, sebagian besar berasal dari tumbuhan yang melakukan proses fotosintesis yang terjadi pada tumbuhan, selain memanfaatkan karbondioksida, juga memerlukan energi dari radiasi matahari, memerlukan air, dan zat-zat hara dalam tanah. Bahan-bahan itu semua diperlukan tumbuhan untuk proses tumbuh, berkembang, dan regenerasi. Pentingnya peranan setiap unsur dalam pembentukan lingkungan hidup bersifat mutlak serta tak tergantikan. Jadi dapat dipahami jika fauna juga merupakan unsur yang bersifat mutlak serta tidak dapat diganti dalam pembentukan lingkungan hidup. Kekhawatiran terhadap adanya kecenderungan beberapa fauna yang sudah mengalami kelangkaan dan kepunahan dapat diantisipasi dengan upaya pencegahan. Upaya pencegahan terhadap kepunahan itu adalah perlindungan terhadap fauna yang bersangkutan.

Dalam rangka upaya penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan satwa yang dilindungi Pemerintah harus melakukan langkah-langkah yang nyata untuk melindungi satwa yang dilindungi yaitu Mempublikasikan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bagi yang melanggar dan memperdagangkannya maupun untuk kebutuhan sehari-hari, dan pemerintah maupun instansi-instansi yang terkait harus benar-benar memperhatikan tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi yang saat ini sangat marak di Indonesia. Pemerintah harus memberikan sanksi yang setimpal kepada pelaku yang melakukan perdagangan satwa yang dilindungi yang sudah diatur dalam undang-undang nomor 5 tahun 1990 dan mengembalikan satwa tersebut ke habitatnya.

Kata Kunci : Lingkungan Hidup, Perdagangan Satwa yang dilindungi, pertanggung jawaban

ABSTRACT

Thoriq Muhammad Al nuddin (1010611067), Criminal Liability Against the Crime of Trafficking Protected Wildlife Act No. 5 of 1990 on Conservation of Biological Resources and their Ecosystems. Under the guidance of Dr. M. Ali Zaidan SH, MH.

Humans, animals, and plants in sustaining life requires other components contained in the environment. Plants and animals need humans as a food source, also a pet food plant, even some animals that become food other animals. Oxygen from the air we breathe in our breathing, mostly from plants that perform photosynthesis that occurs in plants, in addition to utilizing carbon dioxide, also requires energy from solar radiation, requires water, and nutrient substances in the soil. The ingredients were all necessary for the process of growing plants, growing, and regenerasi. Pentingnya role of each element in the formation of the environment is absolute and irreplaceable. So it is understandable if the fauna is also an element that is absolute and can not be replaced in the formation of the environment. Concerns about the tendency of some of the fauna that are already experiencing shortages and extinction may be in anticipation of the prevention effort. Efforts to prevent the extinction of the fauna is protective against relevant

In the framework of efforts to control the Crime of Trafficking protected animals Governments should take steps to protect the real protected animal, namely Publish legislation governing the conservation of natural resources and ecosystems for breaking and trading as well as for daily needs , and the government and relevant agencies should really pay attention to the crime of which dilindungi wildlife trade that is currently very widespread in Indonesia. The government should provide sanctions proportionate to the actors who do the trading of protected animals that are already regulated in Law No. 5 of 1990 and restore the wildlife habitat.

Keywords: Environment, Trafficking, protected animals, accountability